

PEMBANGUNAN BERORIENTASI MANUSIA: SUATU ANALISIS TERHADAP KECENDERUNGAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Arif Susanto

Institut Komunikasi & Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia; arif.s@lspr.edu

Abstrak

Pembangunan manusia dikenal sebagai suatu pendekatan lebih kini yang merespons kelemahan dalam pendekatan modernisasi yang bertumpu kemajuan ekonomi. Kajian ini bertolak dari pertanyaan tentang bagaimana pembangunan manusia di Indonesia pada 2024 dan bagaimana pula hal tersebut berdampak pada kualitas kehidupan warga secara umum? Dengan pendekatan kualitatif, penyelidikan diarahkan pada data-data tertulis dan sumber-sumber terdokumentasi lain. Dalam konteks Indonesia, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat berkelanjutan dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, terdapat dua tantangan yang patut untuk diperhatikan. Pertama, bagaimana agar peningkatan tersebut dapat didorong lebih signifikan dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana agar peningkatan tersebut dibarengi oleh distribusi secara lebih berkeadilan hasil-hasil pembangunan sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalisasi.

Kata Kunci: pembangunan manusia, kapabilitas, kualitas kehidupan

Abstract

Human development has been known as a more recent approach responded to weaknesses in a modernization approach which rely on economic achievement. This study materialized as an interrogative expression about achievements of Indonesia's human development in 2024 and its impact to peoples' quality of life. By elaborating a qualitative approach, the study tries to investigate some written data and other documented sources. In our national context, the study shows that Indonesia Human Development Index has been improved in recent five years. However, there are challenges that need to be managed. First, it is important to make a more significant and continual improvement. Second, it is also challenging to synchronize the achievement with a fair distribution of those developmental product in order to reduce social inequalities.

Keywords: Human Development, capability, quality of life.

PENDAHULUAN

Pembangunan kerap dikaitkan dengan perubahan secara bertahap menuju ke arah lebih baik. Namun, seperti apa kondisi yang lebih baik itu dan bagaimana cara efektif untuk dapat mencapainya? Jawaban atas pertanyaan tersebut mengandaikan banyak hal lebih kompleks, yang kemudian menentukan paradigma pembangunan. Pasca-Perang Dunia II, berkembang paradigma pembangunan sebagai modernisasi. Bersama

dengan itu berkembang pandangan bahwa jalan menuju kemakmuran bagi masyarakat suatu negara adalah dengan cara mengatasi ketertinggalan mereka, terutama dalam hal sosial-ekonomi. Langkah-langkah yang banyak diajukan adalah bagaimana membawa perubahan dari masyarakat dengan perekonomian agraris menuju suatu masyarakat modern yang terindustrialisasi. Selain beberapa catatan keberhasilan, modernisasi memunculkan

berbagai dampak, seperti ketimpangan dan ketergantungan ekonomi.

Salah satu alternatif yang muncul adalah pendekatan kapabilitas dalam pembangunan, yang kemudian populer juga dengan sebutan Pembangunan Manusia. Pendekatan tersebut berkonsentrasi pada dua hal berlainan, yaitu aspek proses dan aspek kesempatan. Pada yang pertama, pelaku pembangunan terlibat dalam pengambilan putusan dan pada yang kedua, pelaku juga memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan yang bernilai dan berterima. Dengan itu, analisis ekonomi turut bergeser; mulanya memandang akumulasi kapital terutama dalam kerangka pendapatan dan aspek-aspek fisik lainnya kemudian berubah melalui integrasi aspek-aspek tersebut dengan proses untuk menghasilkan kualitas produktif dalam makna lebih utuh manusia.

Sejak 1990 United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia melampaui semata kekayaan ekonomi. Di Indonesia, konsep pembangunan manusia yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menempatkan pembangunan manusia sama sentralnya dengan pembangunan ekonomi. Di dalamnya, aspek kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak mendapatkan perhatian yang tidak timpang dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan warga. Berdasarkan Human

Development Indeks UNDP, Indonesia tergolong negara dengan indeks tinggi pembangunan manusia. Selain layak untuk dibanggakan, hal itu tidak boleh melenakan berbagai pihak dari berbagai persoalan yang masih membutuhkan alternatif penyelesaian agar Indonesia mencapai tataran kemajuan lebih tinggi.

Kajian Yin et al (2023) atas data pada 150 negara antara 2005 dan 2018 mengungkap hubungan antara kesejahteraan dalam ukuran-ukuran lebih subjektif (baik secara kognitif maupun afektif) dan Indeks Pembangunan Manusia. Mereka mengemukakan bahwa Indeks tersebut lebih memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan kognitif dibandingkan yang afektif (seperti kebahagiaan dan aspek lain yang turut menentukan kualitas kehidupan). Namun, mereka juga menegaskan bahwa ketiga komponen Indeks (yaitu, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan) memiliki kekuatan prediktif untuk menakar kesejahteraan, meskipun bahwa ketiganya tidak selalu memiliki daya ungkit yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan pada semua negara.

Dalam konteks Indonesia, Mailadani et al (2024) menyusun suatu studi tentang Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada 1990-2021. Hasilnya memperlihatkan bahwa pengangguran, inflasi, investasi asing langsung dan ekspor neto berpengaruh signifikan terhadap IPM dalam jangka pendek. Dalam jangka Panjang, hanya tingkat pengangguran yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Studi lain dilakukan oleh Bhakti dan Suprpto (2014) yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada

2008-2012. Mereka menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Namun, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Serupa dengan kedua kajian terdahulu, kajian ini meneliti tentang pembangunan manusia Indonesia. Namun, berbeda dibandingkan keduanya, kajian ini memilih untuk berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana pembangunan manusia di Indonesia pada 2024 dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas kehidupan warga secara umum. Yang kemudian ingin disampaikan adalah bahwa secara indeks, pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan secara berkelanjutan. Catatan pokoknya, selain perlu untuk ditingkatkan pada tataran lebih signifikan, penting juga untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan capaian pembangunan. Pada sisi lain, dengan menimbang bahwa pembangunan manusia itu terkait bukan semata dengan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, penciptaan kondisi sosial yang lebih kondusif dibutuhkan agar aspek proses dan aspek kesempatan dalam pengembangan kapabilitas manusia dapat lebih optimal.

KERANGKA TEORI

Pembangunan: Suatu Pemahaman Singkat

Bukan perkara mudah untuk mendefinisikan pembangunan. Makna pembangunan telah mengalami banyak perubahan, terutama sejak pertengahan abad ke XX ketika semakin banyak negara menjadikannya sebagai bagian proses pemajuan perekonomian. Perspektif tentang pembangunan juga beragam, dipengaruhi antara lain oleh tujuan-tujuan politik dan tujuan-tujuan ekonomi yang berlainan. Bahkan ketika perspektif tentang pembangunan sebagai suatu pemajuan ekonomi itu dipandang membawa berbagai peningkatan, ia tidak luput dari kritik akibat dampak yang dihasilkannya. Namun demikian, suatu penelusuran tentang arti dasar pembangunan akan membantu untuk memahaminya secara lebih baik dan lebih kritis.

Kata dasar bangun itu berarti bangkit, berdiri. Membangun sebagai suatu kata kerja bermakna tindakan untuk memperbaiki. Pembangunan dapat dimengerti sebagai suatu proses dalam tindakan untuk memperbaiki keadaan. Didalamnya terdapat perubahan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lewat suatu upaya yang boleh jadi berulang dan memakan waktu lama, hasil pembangunan diharapkan dapat membantu pertumbuhan berkelanjutan. Pendeknya, pembangunan itu menghasilkan suatu kemajuan. Dalam pemahaman klasik, pembangunan itu identik dengan pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, peningkatan pendapatan semata tidaklah memadai bagi suatu kehidupan berkualitas sebagai manusia.

Betz (2022: 8) menggambarkan pembangunan sebagai upaya bertahap untuk

menyingkirkan secara lebih mandiri berbagai hambatan bagi perkembangan kemampuan suatu masyarakat. Suatu definisi atas istilah pembangunan yang valid sepanjang masa itu nyaris mustahil, sebab hal semacam itu dapat menghasilkan suatu perlakuan tidak adil terhadap ragam kondisi sosial. Setiap definisi itu bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga bergantung pada nilai-nilai individu maupun nilai-nilai kolektif yang terikat pada keterbatasan ruang dan waktu. Karena itu, suatu definisi yang berpretensi untuk mencakup seluruh nilai yang berkembang dan berambisi untuk bisa bertahan sepanjang waktu hanya akan menjadi suatu pandangan yang ahistoris.

Menulis dari perspektif sejarah, Halmayer dan Chassé (2022) menunjukkan trajektori yang menegaskan keberagaman model pembangunan. Pada masa antara dua Perang Dunia, negara-negara penjajah melihat pembangunan sebagai suatu proses pemajuan sosial ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan keamanan. Seiring semakin lazimnya penggunaan data statistik pembangunan, pasca-Perang Dunia II, Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi alat ukur pembangunan. Tumbuhnya negara-negara baru merdeka dan industrialisasi yang semakin massif memicu perhatian pada aspek lebih teknis dalam pembangunan pada 1950an hingga 1960an. Namun, pembangunan dikritik menciptakan ketergantungan dan berdampak ketimpangan, yang menunjukkan bahwa orientasi pada semata pertumbuhan ekonomi itu tidaklah memadai.

Dalam upaya negara-negara untuk meraih kemajuan, berbagai kesulitan berikut potensial untuk menghambat secara internal pembangunan (Cypher dan Dietz, 2009: 22).

- a. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
- b. Rendahnya tingkat ketersediaan dan efisiensi infrastruktur fisik.
- c. Kurangnya peran dan tingkat perkembangan aktivitas perekonomian modern.
- d. Sistem pendidikan yang tidak efektif dan tertinggal.
- e. Konsep ideologi, pemikiran, dan perilaku yang menghambat kemajuan.
- f. Keterbatasan sumber daya alam suatu negara.
- g. Peran negara, yaitu bagaimana kekuasaan negara dikelola.
- h. Korupsi dan patronase yang memengaruhi kebijakan publik dan perilaku ekonomi.
- i. Distorsi dalam alokasi sumber daya yang berdampak kegagalan pasar.
- j. Karakteristik geografi yang kurang mendukung.
- k. Mewabahnya penyakit yang spesifik di wilayah tertentu.
- l. Perang saudara.

Pendekatan Kapabilitas dalam Pembangunan

Pendekatan kapabilitas diusung antara lain oleh Amartya Sen, peraih Anugerah Nobel Ekonomi 1998. Pendekatan tersebut lahir sebagai bagian kritik terhadap fokus berlebihan pada peningkatan pendapatan dalam pembangunan.

Kebebasan politik dan hak-hak sipil lain kadang dilanggar manakala hal itu dianggap menghalangi pembangunan ekonomi. Padahal, pembangunan ekonomi itu juga terkait dimensi lain, misalnya, jaminan keamanan ekonomi. Kegagalan untuk memperoleh pendapatan, yang berdampak ancaman keamanan ekonomi, dapat terjadi bukan semata karena minimnya sumber daya ekonomi, melainkan bisa juga karena tidak bekerjanya demokrasi. Ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pendekatan lebih komprehensif untuk melihat pembangunan.

Amartya Sen (1999: 53) meletakkan kebebasan sebagai hal esensial dalam pembangunan. Tujuan pembangunan itu terkait penghargaan terhadap kebebasan aktual yang dinikmati oleh mereka yang terlibat. Pada sisi lain, peran instrumental kebebasan itu termasuk berbagai komponen berlainan yang terkait satu sama lain, seperti fasilitas ekonomi, kebebasan politik, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan perlindungan keamanan. Di dalamnya, orang harus diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan jalan hidupnya, bukan sekadar sebagai penerima pasif buah program pembangunan. Untuk itu, negara dan masyarakat memiliki peran ekstensif dalam penguatan dan pemeliharaan kapabilitas manusia.

Kapabilitas itu dapat dipersamakan dengan potensi; ia melampaui sekadar kemampuan, dalam arti semata kekuatan dan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang (Hamilton, 2019: 51). Kapabilitas itu merujuk

pada suatu potensi umum manusia untuk dapat muncul sebagai pelaku yang mandiri manakala di sana terdapat kondisi tepat yang memungkinkan perwujudannya. Di antara kondisi yang mendukung perkembangan kapabilitas tersebut adalah hubungan sosial dan ekonomi serta sarana-sarana lain yang memampukan seseorang untuk mendayagunakan hal-hal dasar yang dimilikinya demi menghasilkan kinerja. Sarana tersebut beragam; tidak terbatas pada tersedianya sejumlah pendapatan atau tingkat pendidikan tertentu, melainkan pula termasuk di dalamnya adalah dukungan sosial tertentu yang memampukan seseorang untuk dapat mengkonversi sumber daya miliknya menjadi suatu capaian aktual sebagaimana yang dia kehendaki.

Sen juga mengubah pandangan tentang kemiskinan. Dalam norma konsumsi, seseorang itu disebut miskin manakala tingkat konsumsinya berada di bawah batas kelayakan tertentu. Konstruksi Sen (2001: 22) tentang kemiskinan itu berbeda; menurutnya, kemiskinan itu adalah tentang deprivasi. Kondisi lapar yang dialami oleh seseorang yang secara sengaja berpuasa, misalnya, berbeda dibandingkan mereka yang lapar karena tidak memiliki makanan. Lebih lanjut, kegagalan seseorang untuk memenuhi tingkat tertentu konsumsi dapat dijelaskan melalui banyak faktor; mulai kemalasannya dalam bekerja hingga represi oleh penguasa yang membatasi kebebasannya untuk bekerja. Berbeda dibandingkan pendekatan berbasis tingkat pendapatan, pendekatan kapabilitas lebih sensitif terhadap kemampuan seseorang untuk mengkonversi sumber daya miliknya, yang

dipengaruhi oleh banyak hal secara personal maupun secara sosial.

Pendekatan kapabilitas Sen, dengan demikian, melengkapi pendekatan lebih konvensional dalam pembangunan. Di dalamnya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan diletakkan sebagai bagian sarana yang memungkinkan seseorang untuk mampu mewujudkan apa yang dia kehendaki dengan hidupnya. Tujuan pembangunan dalam pandangan Sen adalah untuk memperluas kapabilitas; ini menyangkut kebebasan riil, kesempatan untuk dapat mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya seseorang memiliki alasan berterima untuk menganggap capaian tersebut bernilai. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, dalam hal ini, hanyalah berguna manakala keduanya dapat mendukung capaian yang dikehendaki tersebut. Dengan memberi tekanan pada kebebasan dan kemampuan konversi sumber daya, Sen sesungguhnya berkonsentrasi pada suatu pembangunan manusia (Alkire, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian kualitatif, kajian ini berkonsentrasi pada naratif dan tinjauan. Sebagaimana dinyatakan oleh Matthews dan Ross (2010: 142) bahwa suatu penelitian kualitatif itu melibatkan pemahaman subjektif, perasaan, opini, dan keyakinan. Pertanyaan penelitian di dalamnya dapat dijawab melalui deskripsi dan penjelasan tentang peristiwa dengan melibatkan pemahaman, keyakinan, dan

pengalaman partisipan. Data kualitatif biasanya kata-kata atau ekspresi, yang dapat dikumpulkan dari sumber-sumber berlainan.

Dalam suatu penelitian kualitatif, peneliti merupakan suatu instrumen utama. Maksudnya, di situ peneliti mengumpulkan data melalui tinjauan terhadap dokumen, atau mengamati perilaku, atau mewawancara partisipan. Kajian ini memilih untuk meninjau dokumen, data-data tertulis, dan sumber-sumber terdokumentasi lain. Dari berbagai sumber berlainan data tersebut, peneliti kemudian melakukan review, memahami muatannya, dan kemudian mengorganisasi seluruhnya berdasarkan kategori tertentu sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis. Data-data tersebut kemudian direfleksikan, di dalamnya, latar belakang peneliti berkemungkinan memengaruhi tinjauan dan arah kajian, tetapi bias berlebihan perlu dihindari agar kajian tidak jatuh menjadi pandangan yang sepenuhnya subjektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dijalankan melalui empat tahap penting. Pertama, pengumpulan data. Mengandalkan data-data sekunder, penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data yang berasal dari dokumen, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Kedua, reduksi data. Data yang telah diperoleh kemudian direduksi melalui langkah-langkah untuk memilah, menggolongkan, membuang yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data untuk menjaga ketepatpercayaannya. Ketiga, penyajian data. Data yang telah diperoleh dan diorganisasikan sebelumnya disusun dalam teks naratif yang terjaga sistematikanya dan mudah untuk

dipahami. Terakhir, penarikan simpulan. Berdasarkan tinjauan atas data akan dihasilkan temuan, dan kemudian ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas Dalam Pembangunan Manusia

Berbeda dibandingkan pendekatan klasik berbasis pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memilih untuk berfokus pada apa yang membuat kehidupan itu menjadi bernilai, yaitu manusia. Manakala manusia dipandang sebagai yang esensial, tidak lantas berarti bahwa pendapatan ekonomi itu tidak penting. Pendapatan jelas merupakan suatu instrumen penting yang memungkinkan manusia untuk mewujudkan potensi mereka. Namun, tujuan utama pembangunan manusia adalah dalam rangka memungkinkan orang untuk menjadi pelaku utama dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan komunitas (Alkire dan Deneulin, 2009). Di dalamnya, anggota masyarakat menentukan sendiri pembangunan seperti apa yang dapat memperlengkapi diri mereka untuk mengupayakan pencapaian tujuan yang mereka pandang bernilai dan berterima. Apa yang membuat mereka menjadi pelaku adalah bahwa mereka memiliki otoritas untuk menentukan prioritas mereka dan cara terbaik untuk mewujudkannya.

Pembangunan manusia itu identik dengan pendekatan kapabilitas (Cosgrove dan Curtis, 2018: 27). Ia dimaksudkan untuk memperluas kerangka pandang terhadap

kesejahteraan, terutama karena manusia itu tidak bisa dipandang sebagai sekadar instrumen kemajuan. Dalam paradigma pembangunan manusia, faktor-faktor selain ekonomi, seperti faktor politik, faktor budaya, dan faktor-faktor sosial lain diperhatikan. Demikian pula paradigma tersebut memberi perhatian pada dua hal pokok. Pertama adalah pengembangan kapabilitas manusia (seperti perbaikan aspek kesehatan, pengetahuan, dan keahlian). Kedua yaitu bagaimana manusia mendayagunakan kapabilitas tersebut dalam kerangka tujuan-tujuan yang dipandang bernilai dan berterima (misalnya, dalam kerangka aktivitas kerja, politik, waktu luang, dan sebagainya).

Garis besar paradigma pembangunan manusia dirangkum oleh Mahbub ul Haq (1995: 21) sebagai berikut.

- a. Pembangunan itu harus meletakkan manusia sebagai pusat perhatian. Pembangunan itu dianalisis dan dipahami dalam kerangka manusia. Setiap kegiatan di dalamnya ditimbang dalam kerangka bagaimana orang dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat darinya.
- b. Tujuan pembangunan adalah untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi manusia, bukan sekadar persoalan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu menjadi suatu sarana penting bagi perluasan pilihan yang tersedia, sedangkan manusia itu sendiri adalah tujuan terpenting pembangunan.
- c. Paradigma pembangunan manusia itu peduli pada pengembangan kapabilitas

manusia (melalui investasi pada sumber daya manusia) dan pada pemanfaatan secara utuh kapabilitas tersebut (melalui kerangka pemberdayaan demi pertumbuhan dan keterlibatan).

- d. Pembangunan manusia itu memiliki empat pilar penting: kesetimbangan, keberlanjutan, produktivitas, dan pemberdayaan. Ia memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai hal pokok, tetapi menekankan pula pentingnya perhatian pada kualitas dan distribusi pertumbuhan tersebut, menganalisis keterkaitannya dengan kehidupan manusia, dan mempertanyakan keberlanjutannya dalam jangka panjang.
- e. Paradigma pembangunan manusia itu menegaskan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan yang berterima untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Di dalamnya, manusia dipandang bukan sekadar sebagai instrumen untuk menghasilkan komoditas; melainkan bahwa manusia adalah tujuan tertinggi pembangunan,

Lebih lanjut, Nussbaum (2011: 18) menyebut bahwa pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia itu berfokus pada pilihan atau kebebasan. Di dalamnya, masyarakat yang baik itu peduli pada kemajuan kesempatan atau kebebasan substansial bagi warga sehingga mereka dapat mengupayakan perwujudan pilihan mereka.

Pendekatan tersebut terang menghargai keberagaman nilai, dengan kesadaran bahwa pencapaian kapabilitas yang merupakan hal esensial tersebut dapat berbeda kualitas maupun kuantitasnya pada orang berlainan. Demikian pula pendekatan yang sama peduli pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang telah berakar dan berdampak kegagalan kapabilitas. Kondisi terakhir menuntut pemerintah dengan kebijakan publiknya untuk mengembangkan kualitas kehidupan warga, yang ditentukan lewat kapabilitas mereka. Dengan demikian, pendekatan kapabilitas meletakkan manusia sebagai tujuan pembangunan.

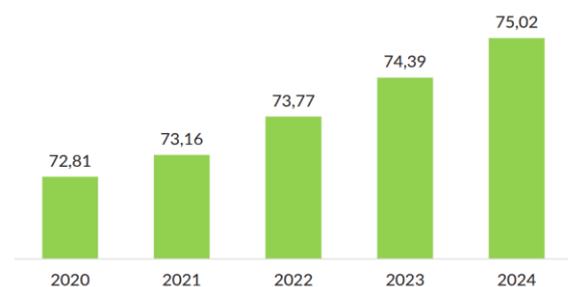
Pembangunan Manusia Indonesia

Laporan tentang Pembangunan Manusia oleh UNDP pada 2020 berjudul *The Next Frontier: Human Development and Anthropocene* menyebutkan bahwa Covid-19 mengungkap dan mengeksploitasi ketidaksetaraan berikut kelemahan-kelemahan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik, serta mengancam pembalikan dalam pembangunan manusia. Sementara dampak Covid-19 yang menghancurkan telah menarik perhatian dunia, krisis berlapis lainnya, mulai dari perubahan iklim hingga meningkatnya ketidaksetaraan, terus memakan korban. Tantangan ketidakseimbangan planet dan masyarakat saling terkait: keduanya berinteraksi dalam lingkaran setan, yang satu memperburuk yang lain. Zaman Manusia telah menghasilkan kemajuan luar biasa, tetapi kemajuan yang sama telah mengacaukan sistem yang justru telah menopang kehidupan manusia.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia secara global mengalami perbaikan setelah pandemi Covid-19, tidak berarti bahwa masa sulit telah berakhir. Laporan Pembangunan Manusia 2023/24 menyoroti ancaman kebuntuan sebagai dampak kemajuan pembangunan yang tidak merata, memburuknya ketimpangan, dan meluasnya polarisasi politik yang mendesak untuk ditangani. Penurunan temperatur bumi dan penanggulangan polarisasi sosial menjadi kebutuhan bersama dengan kemendesaan untuk mengurangi kesenjangan bagi peran subjek-subjek pembangunan. Laporan yang sama menegaskan bagaimana interdependensi global perlu untuk disusun ulang dan penting untuk mengembangkan suatu jalan kemajuan dengan multilateralisme memainkan peran utama di dalamnya. Tatanan semacam itu diharapkan mampu mendistribusikan secara lebih berkeadilan kemanfaatan publik.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan berkelanjutan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional pada dekade terakhir. Pada 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92 meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah target 71,98. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada 2020 sebesar -2,07% dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dampak ikutan pandemi Covid-19 telah turut memporandakan perekonomian global, dengan menyisakan pertumbuhan positif pada negara-negara seperti China (2,3 persen),

Vietnam (2,9 persen), dan Taiwan (2,98 persen). Dengan perekonomian global masih penuh risiko yang memberi tekanan tambahan, perekonomian nasional telah tumbuh kembali pada kisaran di atas 5%. Kendati tidak terjadi suatu perubahan signifikan, kondisi pasca-pandemi menunjukkan perkembangan positif pembangunan manusia. Menimbang perkembangan tersebut, terdapat dua tantangan lanjutan yang patut untuk diperhatikan. Pertama, bagaimana agar peningkatan tersebut dapat didorong lebih signifikan dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana agar peningkatan tersebut dibarengi oleh distribusi secara lebih berkeadilan hasil-hasil pembangunan.



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Jika diperhatikan lebih rinci, Indeks Pembangunan Manusia sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pada ketiga dimensi tersebut, angkanya secara rata-rata juga menunjukkan peningkatan. Umur harapan hidup cenderung meningkat seiring perbaikan layanan kesehatan publik. Demikian pula dalam hal akses belajar; rata-rata lama sekolah cenderung meningkat. Namun, suatu dorongan bagi capaian pendidikan dasar hingga 12 tahun

tampak masih dibutuhkan. Pada tataran lebih lanjut, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan seiring kemampuan para lulusan untuk menjadi lebih kompetitif di dunia kerja. Terakhir, standar hidup layak yang dilihat dari sisi pengeluaran riil per kapita masih perlu untuk terus ditingkatkan; tidak semata terkait jumlah, melainkan pula agar tidak terdapat disparitas mencolok di antara individu atau kelompok berlainan.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Dimensi Penyusunnya 2020–2024.

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Terkait capaian pada tataran provinsi, beberapa hal patut untuk disorot. Status pembangunan manusia di Sulawesi Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,46. Sementara itu, status pembangunan manusia di Papua Tengah meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”, dengan capaian IPM 60,25. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) menjadi sebanyak 30, berstatus “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak 5, dan berstatus “rendah” ($IPM < 60$) sebanyak 1. Sementara itu, DKI Jakarta dan D I Yogyakarta berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq$

80). Yang juga patut untuk disorot adalah terdapatnya disparitas antar-daerah, terutama antara daerah dengan nilai IPM di atas rata-rata nasional dan daerah dengan nilai IPM di bawah rata-rata nasional.



Gambar 2 IPM Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Adalah penting pula untuk memberi perhatian pada aspek distribusional. Data yang dikeluarkan oleh BPS pada Juli 2024 menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan *Gini Ratio* sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* Maret 2023 sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* September 2022 sebesar 0,381. Selama masa pandemi Covid-19, angka *gini ratio* mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah 2020, angka *gini ratio* mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan angka tertinggi sejak September 2018. Namun, *gini ratio* Maret 2024 sudah menurun kembali menjadi 0,379. Pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia secara umum menunjukkan kecenderungan membaik, tetapi perbaikan distribusi ekonomi masih merupakan persoalan.

Aspek lain yang juga patut untuk menjadi perhatian adalah ketimpangan gender. Selama lima tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia secara konsisten mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan. Ini tidak lantas membuat kita berpuas diri, sebab dalam konteks pemberdayaan, keterwakilan perempuan dalam politik masih tertinggal. Demikian pula dalam hal pendidikan tinggi serta keterlibatan dan kemampuan untuk menjadi kompetitif di pasar tenaga kerja. Manakala tidak diperhatikan, hal semacam ini akan menunjukkan hal kontradiktif bahwa aspek distribusional dalam pembangunan masih menyisakan banyak pekerjaan agar peningkatan kuantitas dalam berbagai indikator pembangunan tidak dibarengi ketertinggalan dari segi kualitasnya.

Tabel 2 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2018–2023

Dimensi/Indikator	Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesehatan Reproduksi							
MTF	Perempuan	0,214	0,181	0,163	0,154	0,140	0,126
MHPK20	Perempuan	0,241	0,271	0,263	0,262	0,265	0,258
Pemberdayaan							
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	82,68	79,48	78,91	78,11	78,26	77,86
	Perempuan	17,32	20,52	21,09	21,89	21,74	22,14
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	38,27	39,77	41,63	41,30	42,06	42,62
	Perempuan	30,99	31,85	34,63	34,87	36,95	37,60
Pasar Tenaga Kerja							
TPAK (%)	Laki-laki	82,80	83,25	82,41	82,27	83,87	84,26
	Perempuan	51,80	51,81	53,13	53,34	53,41	54,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendapatan ekonomi semata tidaklah memadai untuk melihat hasil pembangunan. Bahkan ketika perbaikan ekonomi terjadi sebagai bagian bentuk kemajuan, tidak serta-merta bahwa aspek-

aspek lain dalam kehidupan seketika juga mengalami kemajuan. Ini berarti bahwa pembangunan perlu menysasar berbagai aspek yang memperbesar kesempatan bagi seseorang untuk mampu mewujudkan kemajuan yang diharapkannya. Aspek kesempatan tersebut mengandaikan dukungan-dukungan ekonomi, politik, kebudayaan, dan yang lain sehingga terdapat suatu cara pikir lebih komprehensif tentang pembangunan.

Kualitas Hidup

Kesejahteraan menjadi bagian tujuan pokok suatu proses pembangunan. Sejahtera kerap digambarkan sebagai kondisi hidup layak, tidak semata dalam kerangka terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam kerangka kehidupan personal maupun komunal. Suatu negara yang sejahtera mampu menghadirkan bagi warga kemakmuran, kesehatan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Tentu saja, itu semua tidaklah cukup untuk menggambarkan suatu hidup yang berkualitas. Sebab, gambaran tentang hidup berkualitas itu tidaklah tunggal. Di dalamnya terdapat nilai berlainan yang menjadi tujuan yang dicapai oleh orang dalam kehidupan mereka. Yang jelas bahwa kesejahteraan itu merujuk pada manfaat yang dapat diraih dari tindakan tertentu, dalam hal ini pembangunan.

Dalam kontribusi khususnya untuk Human Development Report 2020, Sen menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia itu tidaklah mungkin mampu untuk mencakup seluruh yang ingin dipotret dalam sistem indikator. Namun, demikian lanjut Sen, indeks tersebut mampu

mengatakan jauh lebih banyak tentang kualitas kehidupan dibandingkan sekadar PDB. Indeks yang sama merujuk pada kemungkinan untuk memikirkan tentang hal-hal lebih signifikan terkait kehidupan manusia dibandingkan sekadar nilai pasar komoditas yang diperjualbelikan. Lewat indeks pembangunan manusia, dampak tingkat rendah kematian, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan hal-hal mendasar terkait kehidupan manusia dapat ditimbang bersamaan dalam bentuk agregat. Dalam kerangka yang sama, kebebasan untuk melakukan tindakan dan membuat pilihan bernilai serta berterima dalam kehidupan juga ditempatkan sebagai hal berharga.

Dengan pendekatan kapabilitas, pembangunan manusia sesungguhnya menghendaki suatu perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Pendekatan kapabilitas menggeser perhatian dari sarana mengarah pada kesempatan. Persoalan pokok pembangunan itu bukanlah berapa banyak kekayaan material yang dimiliki oleh seseorang, melainkan bagaimana kepemilikan atas sumber daya itu dapat memperluas kesempatan bagi seseorang untuk mewujudkan tujuan bernilai yang juga berterima. Penentu keberhasilan pembangunan, dengan demikian, bukanlah terbatas pada apa yang dimiliki (sarana) dan apa yang bisa diwujudkan (pencapaian tujuan), melainkan kemampuan untuk dapat mengkonversi sarana untuk mewujudkan tujuan tertentu (Sunaryo dan Hasan, 2024: 60).

Menimbang pembangunan di Indonesia, sejarah mengingat bahwa pada masa Soeharto, ketika pembangunan digembar-gemborkan, orientasi berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah membuat aspek distribusi diabaikan. Demikian pula aspek-aspek non-ekonomi banyak dinafikan, bahkan dipandang sebagai hambatan bagi upaya pencapaian target-target pembangunan ekonomi. Kebebasan politik dan demokrasi, misalnya, kerap diletakkan sebagai penghalang yang membuat pengambilan putusan tidak efisien dan menciptakan instabilitas yang mengganggu pembangunan ekonomi. Pasca-Soeharto meningkatnya perhatian terhadap hal-hal yang sebelumnya diabaikan telah membuat pembangunan menjadi lebih mampu untuk memanusiakan manusia. Di dalamnya, martabat kemanusiaan memperoleh perhatian lebih baik seiring perkembangan global manakala diperkenalkan konsep pembangunan manusia.

Adalah penting untuk, kendati demikian, memahami pembangunan manusia dalam konteks yang lebih utuh. Beberapa catatan dapat diajukan agar pembangunan manusia dapat memberi sumbangan bagi peningkatan kualitas hidup warga. Pertama, pemenuhan aspek-aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu pula untuk dikaitkan dengan aspek kebebasan politik yang memungkinkan konversi ketiga aspek tersebut menjadi keterlibatan aktif warga dalam berbagai aktivitas sosial. Kedua, termasuk dalam keberhasilan pembangunan adalah manakala kapabilitas warga memungkinkan perhatian terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup yang tidak dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pembangunan

manusia juga perlu memiliki sensitivitas budaya agar program pembangunan tetap menghargai keberagaman nilai dan tidak menghasilkan tatanan yang monolitik.

KESIMPULAN

Pembangunan perlu untuk menempatkan manusia sebagai tujuan dengan kesejahteraan mereka bergantung pada bukan semata kepemilikan atas sumber daya. Lewat pendekatan kapabilitas, pembangunan manusia peduli pada persoalan bagaimana memperluas kesempatan bagi seseorang untuk dapat mewujudkan apa yang dikehendakinya. Tujuan utama pembangunan manusia adalah dalam rangka memampukan orang untuk menjadi pelaku utama dalam kehidupan sosial.

Meskipun tidak terjadi lonjakan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat berkelanjutan dalam lima tahun terakhir. Menimbang perkembangan tersebut, terdapat dua tantangan yang patut untuk diperhatikan. Pertama, bagaimana agar peningkatan tersebut dapat didorong lebih signifikan dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana agar peningkatan tersebut dibarengi oleh distribusi secara lebih berkeadilan hasil-hasil pembangunan sehingga ketimpangan sosial dapat diminimasi.

Ketimpangan masih menjadi salah satu persoalan serius terkait pembangunan di Indonesia. Dari sisi pendapatan, gender, dan indeks pembangunan manusia secara umum masih terdapat kesenjangan yang menuntut

perhatian pada aspek distribusi kesejahteraan. Manakala problem ketimpangan dapat dikurangi, terdapat kesempatan lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan.

SARAN

Dari sisi praktikal, pembangunan manusia perlu memberi perhatian tidak semata pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; di luar ketiganya, pembangunan perlu mengintegrasikan kebebasan yang memungkinkan konversi aspek-aspek tersebut menjadi apa yang dipandang bernilai dan berterima. Konteks demokrasi selaras dengan hal tersebut, dan ketika ancaman kemunduran demokrasi menjadi kian nyata, perhatian terhadap keberlangsungan demokrasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak mungkin untuk disepelekan.

Dari sisi akademik dapat dilakukan suatu penelitian lanjutan dengan meninjau pembangunan manusia dalam kerangka keterkaitannya dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Setelah berbagai kritik dalam inisiatif tentang Tujuan Pembangunan Milenial, UNDP memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dengan tiga tujuan utama, yaitu: memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya, mengurangi ketimpangan, aksi iklim dan keberlanjutan lingkungan. Tinjauan terhadap pendekatan kapabilitas dalam kerangka konsepsi pembangunan berkelanjutan akan memperkaya perspektif tentang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, Sabina. (2010). Development: A Misconceived Theory Can Kill. Dalam Christopher W Morris (ed), *Amartya Sen*, pp 191-220. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alkire, Sabina dan Séverine Deneulin. (2009). The Human Development and Capability Approach. Dalam Séverine Deneulin dan Lila Shahani (eds), *An Introduction to the Human Development and Capability Approach*, pp 22-48. London: Earthscan Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS.
- Betz, Joachim. (2022). *Development Policy: An Introduction to Objectives and Results*. Wiesbaden, Germany: Springer.
- Bhakti, Nadia Ayu dan Istiqomah Suprpto. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 18(4): 452-469.
- Cosgrove, Serena dan Benjamin Curtis. (2018). *Understanding Global Poverty: Causes, Capabilities and Human Development*. London dan New York: Routledge.
- Cypher, James M dan James L Dietz. (2009). *The Process of Economic Development*. London dan New York: Routledge.
- Halsmayer, Verena dan Daniel Speich Chassé. (2022). Economic Growth and the Object of Development. Dalam Corinna R Unger, Iris Borowy, dan Corinne A Pernet (eds), *The Routledge Handbook on the History of Development*, pp 19-33. London dan New York: Routledge.
- Hamilton, Lawrence. (2019). *Amartya Sen*. Cambridge: Polity Press.
- Mailadani, Diah Ayu, Syafri, dan Lydia Rosintan. 2024. Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 1990-2021. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 24(1): 1-9.
- Matthews, Bob dan Lizz Ross. (2010). *Research Methods: A Practical Guide for the Social Sciences*. Essex: Pearson Education Limited.
- Nussbaum, Martha C. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sen, Amartya. (2001). *Poverty and Famines*. Oxford: Oxford University Press.
- Sunaryo dan Pipip A Rifai hasan. (2024). *Konsep Kualitas Hidup dalam Kerangka Kapabilitas*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ul Haq, Mahbub. (1995). *Reflections on Human Development*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2020). *The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2024). *Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: UNDP.
- Yin, Remi, Anthony Lepinteur, Andrew E Clark, dan Conchita D'Ambrosio. (2023). Life Satisfaction and the Human Development Index Across the World. *Journal of Cross-Cultural Psychology* 54(2): 269-282.